



PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN  
AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

# BULETIN APBN

Vol. VIII, Edisi 23, Desember 2023

## **Mengulas Eliminasi Malaria**

*p.3*

## **Urgensi Perbaikan Tata Kelola Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai Upaya Meningkatkan Riset dan Inovasi**

*p.7*

## **Peluang Pengembangan Pariwisata Kesehatan di Indonesia**

*p.11*

ISO 9001:2015  
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685



# Dewan Redaksi

## Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,  
M.Hum.

## Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani  
Tio Riyono

## Penanggung Jawab

Dr. Ari Muliarta Ginting, S.E.,  
M.S.E.

## Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo  
Dahiri  
Martha Carolina

## Editor

Riza Aditya Syafri

## Mengulas Eliminasi Malaria

p.3

Komitmen pemerintah menangani kasus malaria sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria pada tahun 2024 sebesar 405 kabupaten/kota di Indonesia dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Indonesia merupakan negara di wilayah asia tenggara yang turut menyumbangkan kasus malaria terbesar setelah India. Pada tahun 2022 merupakan peningkatan kasus terbanyak dalam 3 tahun terakhir. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa masih terdapat 11 persen penduduk berada di daerah endemis malaria yang tersebar di 142 kabupaten/kota. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan Komisi IX DPR RI guna menangani malaria, diantaranya yaitu mendorong Kementerian Kesehatan meningkatkan alokasi anggaran program penanganan malaria, sosialisasi PHBS dan edukasi penanganan malaria, serta koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah.

p.7

## Urgensi Perbaikan Tata Kelola Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai Upaya Meningkatkan Riset dan Inovasi

Salah satu tahapan penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah melakukan penguatan riset dan inovasi. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam memperkuat fondasi teknologi, riset dan inovasi. Pertama, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai satu-satunya badan penelitian nasional belum menunjukkan kinerja riset dan penelitian yang optimal. Kedua, penetapan alokasi anggaran BRIN yang tidak berfokus kepada program utama BRIN. Komisi VII DPR RI perlu untuk mendorong BRIN untuk meningkatkan produktivitas yang diselaraskan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, melakukan penyesuaian anggaran BRIN untuk tahun anggaran 2024, dan mendorong BRIN untuk menyajikan data yang rinci sampai dengan satuan tiga terkait realisasi penggunaan anggaran.

## Peluang Pengembangan Pariwisata Kesehatan di Indonesia

p.11

Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata kesehatan. Pengembangan potensi tersebut dapat melalui hasil produksi olahan tanaman herbal, industri spa, event olahraga internasional dan pembangunan KEK Sanur. Terdapat tantangan yang dihadapi pemerintah, yakni belum adanya peta jalan pembangunan pariwisata kesehatan, belum masifnya promosi dan ketersediaan informasi mengenai pariwisata kesehatan, dan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Dorongan kepada pemerintah diperlukan dari Komisi X DPR RI untuk segera menyusun peta jalan pembangunan pariwisata kesehatan serta memasifkan promosi dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai pariwisata kesehatan yang sudah ada dan yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Guna menekan biaya pengadaan, Komisi XI DPR RI mendorong pemerintah untuk mengatur pajak alat kesehatan (alkes) dari kategori barang mewah.

Kritik/Saran

<http://pa3kn.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website [www.pa3kn.dpr.go.id](http://www.pa3kn.dpr.go.id)

# Mengulas Eliminasi Malaria

Arjun Rizky Mahendra Nazhid\*)  
Savitri Wulandari\*\*)

## Abstrak

Komitmen pemerintah menangani kasus malaria sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293 Tahun 2009 tentang Eliminasi Malaria pada tahun 2024 sebesar 405 kabupaten/kota di Indonesia dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Indonesia merupakan negara di wilayah asia tenggara yang turut menyumbangkan kasus malaria terbesar setelah India. Pada tahun 2022 merupakan peningkatan kasus terbanyak dalam 3 tahun terakhir. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa masih terdapat 11 persen penduduk berada di daerah endemis malaria yang tersebar di 142 kabupaten/kota. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan Komisi IX DPR RI guna menangani malaria, diantaranya yaitu mendorong Kementerian Kesehatan meningkatkan alokasi anggaran program penanganan malaria, sosialisasi PHBS dan edukasi penanganan malaria, koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah terkait peningkatan program fogging dan percepatan penanganan bagi daerah yang masuk dalam kategori endemis malaria.

Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di dunia saat ini, termasuk Indonesia. Malaria merupakan salah satu jenis penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk, terutama nyamuk anopheles. Penyakit malaria dibagi menjadi 2 (dua) yaitu biasa dan berat. Penyakit malaria biasa adalah penyakit yang biasanya tidak menyebabkan komplikasi parah dan hanya menimbulkan gejala utama karena tidak ada organ vital yang terdampak. Gejala yang muncul umumnya bertahan selama 6-10 jam. Sedangkan penyakit malaria berat merupakan komplikasi dari jenis biasa apabila tidak segera ditangani. Penyebab malaria berat umumnya adalah parasit *plasmodium falciparum* yang menyebabkan komplikasi.

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa terdapat 229 juta kasus malaria di seluruh dunia pada tahun 2019 dengan angka kematian rata-rata sebesar 409 ribu jiwa. Mayoritas dari korban malaria adalah anak-anak yang berusia di bawah lima tahun. Kasus malaria di berbagai belahan dunia paling banyak terjadi di wilayah afrika (sekitar 90 persen), disusul dengan Asia Tenggara,

Amerika Selatan dan Sub-Sahara Afrika. Indonesia merupakan negara di wilayah asia tenggara yang turut menyumbangkan kasus malaria terbesar setelah India.

## Kasus dan Tren Kematian di Indonesia

Jumlah kasus malaria tertinggi di Indonesia terjadi di tahun 2012 dengan jumlah kasus sebesar 417.819 dan mengalami tren penurunan menjadi 222.084 kasus di tahun 2018. Jumlah kasus malaria terus meningkat setelah tahun 2018. Puncaknya terjadi di tahun 2022, melampaui jumlah kasus pada tahun 2012. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus malaria di Indonesia terus meningkat dalam kurun waktu 2020-2022, dari 254.055 kasus di tahun 2020 menjadi 443.530 kasus di tahun 2022 (Gambar 1). Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa kasus malaria tertinggi di Indonesia terjadi di kawasan Indonesia Timur, sekitar 400.253 di tahun 2022. Kasus tertinggi terjadi di Provinsi Papua, yakni menyumbangkan kasus positif sebanyak 356.889 dari total kasus nasional.

Tren peningkatan jumlah kasus juga linear dengan peningkatan tren kematian. Jumlah kematian di tahun 2022 sebanyak

\*) Analis APBN Non-ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

\*\*\*) Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Kasus dan Tren Kematian Malaria di Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber: Kementerian Kesehatan (2023), diolah.

71 jiwa. Kematian tersebut merupakan kejadian kematian tertinggi dalam kurun waktu tahun 2018-2022 (Gambar 1). Hampir 80 persen dari kejadian kematian tersebut disumbangkan oleh anak di bawah usia 5 tahun yang merupakan kelompok yang paling rentan terkena malaria (Kementerian Kesehatan, 2022b). Tren peningkatan jumlah kasus dan jumlah kematian akibat malaria dalam kurun waktu tersebut sudah seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah (Kementerian Kesehatan) untuk menekan angka kejadian kasus dan kematian. Komisi IX DPR RI perlu mendorong dan memastikan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pemeriksaan dan pengobatan, serta mempercepat realisasi program eliminasi malaria di tahun 2024.

### Dukungan Anggaran dan Upaya Melalui Program

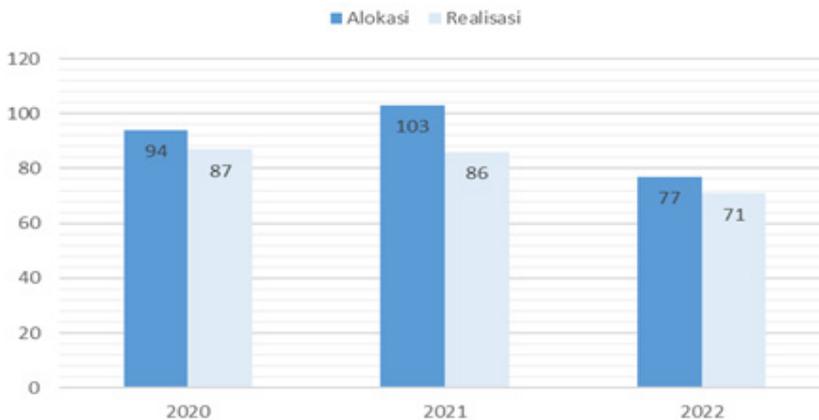
Pemerintah terus menggulirkan program eliminasi malaria guna mendukung pemenuhan target Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam menurunkan jumlah kasus dan mencapai eliminasi malaria di tahun 2024.

Berbagai upaya terus dijalankan melalui beberapa program untuk mencapai target jumlah kabupaten/kota dalam eliminasi malaria, antara lain: (a) melakukan

diagnostik malaria melalui pemeriksaan laboratorium menggunakan dengan mikroskop ataupun *Rapid Diagnostic Test* (RDT); (b) Pelaksanaan tatalaksana kasus malaria melalui rekomendasi Kemenkes dalam penggunaan obat pilihan yaitu *Artemisinin based Combination Therapy* (ACT) dan klorokuin telah resisten yang efektif membunuh parasit; (c) kegiatan surveilans malaria dalam mengidentifikasi daerah atau kelompok dengan risiko malaria dan perencanaan SDM dalam penggunaan Sistem Informasi Malaria (SISMAL) yang diperlukan untuk pendataan serta pengendalian malaria; (d) pengendalian vektor malaria pembagian kelambu ke masyarakat dilakukan dengan dua metode, yaitu pembagian secara massal (*mass campaign*) dan pembagian rutin; (e) promosi, advokasi, dan kemitraan secara sosialisasi pentingnya upaya pengendalian malaria untuk pengambil kebijakan, pelaksana teknis dan masyarakat luas; (f) pengadaan alat dan bahan media KIE; (g) pencegahan dan pengendalian malaria, serta (h) ketersediaan sarana dan prasarana sebagai media untuk promosi dan sosialisasi.

Berbagai upaya tersebut idealnya mendapat dukungan anggaran yang memadai. Apabila melihat tren tahunan, dukungan anggaran program eliminasi malaria dalam kurun waktu tahun 2020-2022 terus menurun (Gambar 2).

Gambar 2. Pagu dan Realisasi Anggaran Eliminasi Malaria 2020 – 2022 (Dalam Rp Miliar)



Sumber: Kementerian Kesehatan (2023), diolah.

Dukungan anggaran pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp86 miliar dari Rp87 miliar di tahun 2021. Kembali mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi Rp71 miliar. Penurunan anggaran tersebut dicemaskan dapat berdampak terhadap upaya eliminasi malaria di tengah terjadinya peningkatan jumlah kasus. Tren penurunan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah belum konsisten dalam mendukung program eliminasi malaria yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

### Capaian Kabupaten/Kota Beberapa Tahun Terakhir

Mengingat bahwa penyakit malaria masih menjadi masalah kesehatan yang berdampak pada penurunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi dimasa yang akan datang. Salah satu target indikator yang hendak dicapai oleh pemerintah untuk mengatasi penyakit malaria adalah mewujudkan 405 kabupaten/kota mencapai eliminasi malaria. Hal tersebut tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa capaian eliminasi malaria kabupaten/kota setiap tahun sepanjang periode tahun 2021-2022 selalu melampaui target (Tabel 1), setelah tahun 2020 masih di bawah target. Realisasi tahun 2023 per April sudah mencapai 381 kabupaten/kota. Capaian tersebut masih di bawah target

tahun 2023 sebesar 385 kabupaten/kota. Apabila pemerintah tetap konsisten dengan program yang dijalankan hingga saat ini, pemenuhan 405 kabupaten/kota tereliminasi malaria sesuai target RPJMN 2020-2024 masih sangat mungkin diwujudkan. Komisi IX DPR RI perlu memastikan Kementerian Kesehatan untuk tetap konsisten menjalankan program eliminasi malaria mengingat masih ada sekitar 99 kabupaten/kota yang harus menjadi target eliminasi malaria di RPJMN periode berikutnya dan masih terjadinya tren peningkatan kasus di beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. Target dan Capaian Kabupaten/Kota yang Mencapai Eliminasi Malaria 2020 - 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target RPJMN	325	345	365	385	405
Realisasi	318	347	372	381*	NN

Sumber: RPJMN 2020 - 2024, Kementerian Kesehatan, 2020-2023, diolah.

Pertimbangan lain yang mengharuskan pemerintah konsisten menjalankan program eliminasi malaria adalah masih relatif besarnya jumlah penduduk yang berada di daerah endemis malaria. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa masih terdapat 11 persen penduduk berada di daerah endemis malaria yang tersebar di 142 kabupaten/kota. Jumlah penduduk tersebut tersebar di daerah endemis rendah, endemis sedang dan endemis tinggi (Tabel 2). Masih terdapat 3,6 juta jiwa yang berada di wilayah endemis tinggi dan tersebar di

Tabel 2. Capaian Penduduk Berdasarkan Endemisitas 2022

No	Endemisitas	Penduduk 2022		Kabupaten 2022	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Eliminasi (Bebas Malaria)	243.796.793	89,00	372	72,37
2	Endemis Rendah	22.004.854	8,00	87	16,93
3	Endemis Sedang	5.457.056	2,00	27	5,25
4	Endemis Tinggi	3.600.391	1,00	28	5,45
Total		274.859.094	100	514	100

Sumber: Kementerian Kesehatan (2023), diaolah.

28 kabupaten/kota yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

Masih tingginya jumlah penduduk berada di daerah endemis malaria tersebut disebabkan beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah masih kurangnya kurang informasi terkait penanganan penyakit malaria di masyarakat, masih rendahnya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan masyarakat, minimnya program fogging yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota, rendahnya dukungan anggaran, dan lambatnya penanganan malaria yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota.

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi Komisi IX DPR RI. **Pertama**, komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan anggaran program guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. **Kedua**, mendorong Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi PHBS di masyarakat, serta edukasi terkait penyakit malaria dan penanganannya. Program sosialisasi dan edukasi tersebut juga dapat disertai dengan pemberian alat untuk pencegahan malaria, seperti; kelambu/jaring pengaman, lotion anti nyamuk, dan lain sebagainya.

**Ketiga**, mendorong Kementerian Kesehatan untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan program fogging di daerahnya guna membasmi nyamuk yang berpotensi menyebabkan penyakit malaria. **Keempat**, mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan percepatan penurunan kasus dan eliminasi malaria di kabupaten/

kota yang masuk dalam kategori daerah endemis malaria, khususnya Provinsi Papua sebagai penyumbang kasus tertinggi malaria di Indonesia.

## Daftar Pustaka

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bapepenas.

DataIndonesia.id. (2023). Kasus Malaria Indonesia Melonjak 36,29 Persen pada 2022. Diakses melalui <https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/kasus-malaria-indonesia-melonjak-3629-pada-2022>, pada 21 Agustus 2023.

Kementerian Kesehatan. (2023). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Kementerian Kesehatan. (2022a). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Kementerian Kesehatan. (2022b). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan. (2022c). Malaria. Diakses melalui [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1329/malaria#:~:text=Gejala%2Dgejala%20dan%20tanda%2Dtanda,4%20minggu%20setelah%20pertama%20kali](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1329/malaria#:~:text=Gejala%2Dgejala%20dan%20tanda%2Dtanda,4%20minggu%20setelah%20pertama%20kali), pada 21 Agustus 2023.

World Health Organization. (2023). Hari Malaria Sedunia. Diakses melalui <https://www.who.int/indonesia/news/events/world-malaria-day/2023>, pada 21 Agustus 2023.

World Health Organization. (2022). *World Malaria Report 2022*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (2020). *World Malaria Report (2020)*. Geneva: World Health Organization.

# Urgensi Perbaikan Tata Kelola Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai Upaya Meningkatkan Riset dan Inovasi

Leo Iskandar<sup>\*)</sup>

## Abstrak

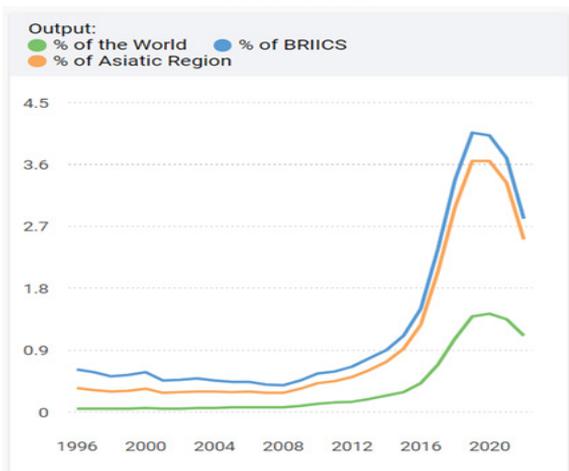
Salah satu tahapan penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 adalah melakukan penguatan riset dan inovasi. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam memperkuat fondasi teknologi, riset dan inovasi. Pertama, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai satu-satunya badan penelitian nasional belum menunjukkan kinerja riset dan penelitian yang optimal. Kedua, penetapan alokasi anggaran BRIN yang tidak berfokus kepada program utama BRIN. Ketiga, BRIN belum melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban realisasi anggaran secara rinci dan transparan. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu untuk mendorong BRIN untuk meningkatkan produktivitas yang diselaraskan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, melakukan penyesuaian anggaran BRIN untuk tahun anggaran 2024, dan mendorong BRIN untuk menyajikan data yang rinci sampai dengan satuan tiga terkait realisasi penggunaan anggaran.

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah mencanangkan visi menuju Indonesia Emas 2045, yaitu untuk menjadi negara nusantara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, Bappenas telah menyusun rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang di dalamnya memuat kerangka pikir atau agenda transformasi, salah satunya yaitu transformasi ekonomi. Salah satu tahapan penting dalam mewujudkan transformasi ekonomi adalah penguatan fondasi transformasi yang di dalamnya mencakup penguatan riset dan inovasi. Hal ini menjadi strategi bagi Indonesia untuk keluar dari *middle income trap*, yaitu melalui transformasi pertumbuhan ekonomi yang berfokus kepada pertumbuhan industri dalam negeri yang kuat berbasis teknologi, riset dan inovasi.

## Kondisi Dunia Penelitian dan Teknologi di Indonesia

Berdasarkan data Scimago Country Rankings selama 5 tahun terakhir, Indonesia mengalami penurunan

Gambar 1. Output Penelitian Indonesia Dibandingkan dengan Output Penelitian Negara-Negara di Dunia, Asia dan BRIICS



Sumber: Scimago Journal & Country Rank (2023).

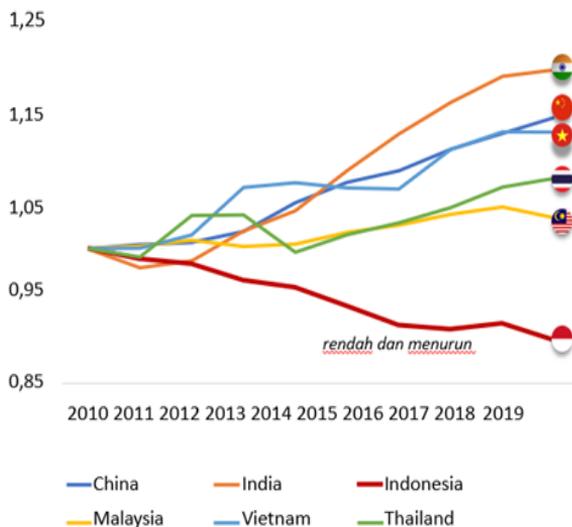
peringkat dari sebelumnya pada posisi 23 dunia di tahun 2018 menjadi posisi 25 di tahun 2022. Indikator penilaian tersebut mencakup kuantitas maupun kualitas dari *output* penelitian suatu negara, di antaranya adalah jumlah dokumen ilmiah yang dipublikasikan dan jumlah kutipan yang diterima. Pada rentang tersebut, terjadi penurunan publikasi dokumen ilmiah, dari 37,23% di tahun 2019 menjadi 0,69% di tahun 2021. Bahkan di tahun 2022, terjadi kemunduran yang berarti sebesar -16,86%. Gambar 1 menunjukkan

<sup>\*)</sup> Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

bahwa pada periode tahun 2014-2019 terjadi tren peningkatan persentase kontribusi penelitian Indonesia di lingkup dunia, Asia, dan BRIICS, yang merupakan sebuah akronim yang merujuk kepada 6 negara berkembang utama, yakni Brazil, Rusia, India, Indonesia, China dan South Africa. Namun pada periode tahun 2020-2022, tren tersebut cenderung menunjukkan arah yang sebaliknya. Hal ini menunjukkan riset dan inovasi di Indonesia beberapa tahun terakhir masih belum memperlihatkan perkembangan yang luar biasa.

Hasil riset dan penelitian, pada banyak kasus akan memunculkan inovasi yang tidak bisa dipisahkan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Maradana *et al.*, 2017). Tingkat produktivitas perekonomian Indonesia, yang dilihat dari *total factor productivity index* (Gambar 2), pada periode 2010-2019 mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif. Bappenas mencatat kondisi produktivitas sektor ekonomi yang rendah tersebut disebabkan karena ketertinggalan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, ketertinggalan kualitas SDM serta lemahnya faktor-faktor terkait kelembagaan, seperti kepastian hukum, sistem insentif dan regulasi. Kataoka (2020) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa terjadi pertumbuhan

Gambar 2. Total Factor Productivity Index 2010-2019 (2010 = 1,0)



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, (2023).

*total factor productivity* Indonesia yang negatif untuk rentang periode tahun 1990-2015, di mana ia mengaitkan perubahan *total factor productivity* yang terjadi dengan perubahan teknologi dan efisiensi. Penelitiannya mengemukakan bahwa pertumbuhan *total factor productivity* yang negatif tersebut terjadi karena faktor kemunduran teknologi, selain juga karena tidak adanya peningkatan efisiensi yang berarti dalam proses produksi.

Berdasarkan laporan Global Innovation Index (GII) tahun 2021, Indonesia tercatat mengalami penurunan peringkat dari sebelumnya secara konstan menempati peringkat 85 pada tahun 2018-2020 menjadi peringkat 87 di tahun 2021. Namun sebaliknya, laporan GI tahun 2022 dan 2023 menunjukkan terjadinya peningkatan peringkat Indonesia di skala global secara berturut-turut menjadi peringkat 75 dan kemudian menjadi peringkat 61. Hal yang mendasari terjadinya perbaikan peringkat tersebut adalah adanya perbaikan indikator-indikator yang terkait dengan terwujudnya inovasi. Pada GI 2022, Indonesia tercatat mengalami peningkatan dalam sub-kategori kolaborasi riset dan pengembangan antara industri dan perguruan tinggi. Dari sebelumnya pada rentang periode 2018-2021, Indonesia berada pada kisaran peringkat 30, pada tahun 2022 naik secara cepat menjadi peringkat 13.

Pada GI 2023, secara umum Indonesia tercatat merupakan negara di wilayah ASEAN dan Oseania dengan peningkatan peringkat tertinggi. Sekali lagi, peningkatan peringkat ini salah satunya disumbang dari tingginya peringkat Indonesia untuk sub kategori kolaborasi riset dan pengembangan antara industri dan perguruan tinggi, yang kini menjadi peringkat 5 dunia. Selain itu, valuasi perusahaan-perusahaan *unicorn* dalam suatu negara juga menjadi salah satu indikator penilaian, di mana indikator ini juga menjadi salah satu kekuatan Indonesia dalam penilaian GI 2023. J&T Express, suatu perusahaan *unicorn* yang bergerak di bidang logistik dan pengiriman,

menyumbang peringkat 13 dunia bagi Indonesia untuk kategori tersebut.

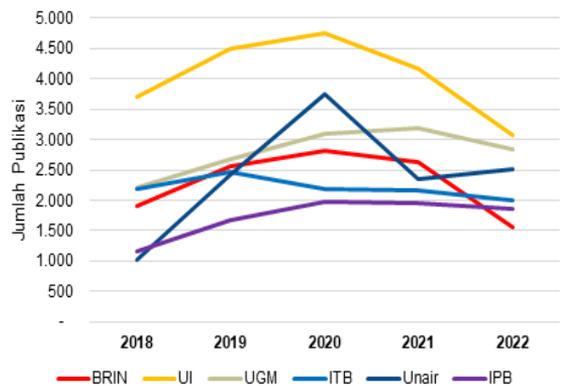
Terlihat bahwa kolaborasi riset yang dikembangkan antara perguruan tinggi dan industri turut mendorong peningkatan inovasi. Selain perguruan tinggi, Indonesia memiliki suatu badan yang memiliki kewenangan di bidang penelitian, yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional secara jelas menetapkan BRIN sebagai satu-satunya badan penelitian nasional. Peraturan ini yang kemudian membuat lembaga penelitian nasional lain, yakni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melebur ke dalam BRIN. Tentunya dengan penggabungan tersebut diharapkan kinerja penelitian nasional menjadi semakin terkoordinasi dan Indonesia mampu untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang berguna untuk memaksimalkan peningkatan pertumbuhan industri dalam negeri.

### Tantangan dalam Mewujudkan Penguatan Riset dan Inovasi

**Pertama**, BRIN sebagai satu-satunya badan penelitian nasional belum menunjukkan kinerja riset dan penelitian yang optimal. Berdasarkan data jurnal SINTA, tercatat BRIN hanya memiliki 1 jurnal skala nasional dengan akreditasi jurnal Sinta 2. Dibandingkan dengan 5 perguruan tinggi negeri yang masuk dalam daftar 500 perguruan tinggi terbaik di dunia versi Quacquarelli Symonds World University Rankings 2024, secara rata-rata perguruan tinggi tersebut memiliki 58 jurnal dengan akreditasi jurnal Sinta 1 paling sedikit untuk 3 jurnal. Dari sisi jumlah publikasi ilmiah, pada tahun 2022 peneliti BRIN mempublikasikan 1.568 dokumen ilmiah, terendah dibandingkan dengan jumlah dokumen ilmiah yang dipublikasikan peneliti dari perguruan tinggi (Gambar 3).

Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu untuk mendorong BRIN untuk meningkatkan produktivitas baik kuantitas dan kualitas jurnal maupun jumlah publikasi dokumen ilmiah, yang diselaraskan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, di mana di dalamnya telah ditetapkan 10 industri prioritas yang terbagi menjadi industri andalan, yaitu industri pangan, industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan, industri tekstil dan alas kaki, industri alat transportasi, industri elektronika dan yang terkait teknologi komunikasi dan informasi, dan industri pembangkit energi; industri pendukung, yaitu industri barang modal, bahan penolong, komponen dan jasa industri; serta industri hulu, yaitu industri hulu agro, industri logam dasar, dan industri kimia dasar.

Gambar 3. Jumlah Publikasi BRIN dan 5 Perguruan Tinggi Tahun 2018-2022



Sumber: Jurnal Sinta Kemdikbud (2023), diolah.

**Kedua**, penetapan alokasi anggaran BRIN yang tidak berfokus kepada program utama BRIN yaitu Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Porsi anggaran untuk Program Dukungan Manajemen pada tahun 2022 sebesar 50,24% dari total anggaran BRIN Rp6,1 triliun. Porsi anggaran untuk program pendukung tersebut terus mengalami kenaikan, di mana pada tahun anggaran 2023 menjadi sebesar 64,83% dan pada tahun anggaran 2024 menjadi 66,44%. Selain itu, rencana alokasi anggaran BRIN untuk tahun anggaran 2024 mengalami penurunan, dari Rp6,4 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp5,7 triliun. Hal ini menyebabkan anggaran untuk program

utama BRIN menjadi semakin kecil. Dengan nilai anggaran untuk program utama sebesar Rp1,9 triliun menjadikan nilai tersebut yang terkecil selama periode tahun anggaran 2022-2024. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu mendorong untuk dilakukan penyesuaian anggaran BRIN untuk tahun anggaran 2024, baik dengan cara memperbesar porsi alokasi anggaran untuk program utama BRIN ataupun meningkatkan total anggaran BRIN untuk tahun anggaran 2024.

**Ketiga,** BRIN belum melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban realisasi anggaran secara rinci dan transparan. Dalam rapat dengar pendapat antara BRIN dengan Komisi VII DPR RI tahun 2022 dan 2023, Kepala BRIN tidak memaparkan dengan rinci dan transparan pelaksanaan program-program yang dijalankan pada tahun anggaran berjalan.

Pelaporan realisasi anggaran secara rinci dan transparan penting untuk didorong, terutama oleh Komisi VII DPR RI, sebagai dasar Anggota Komisi VII DPR RI untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran BRIN dalam tujuan mewujudkan penguatan riset dan inovasi, terlebih ketika BRIN juga mendesain program yang anggarannya berasal dari dana abadi penelitian yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan. Besaran dana abadi penelitian hingga tahun 2023 secara akumulasi mencapai Rp13 triliun. Komisi VII DPR RI perlu mendorong BRIN untuk menyajikan data yang rinci sampai dengan satuan tiga terkait realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disetujui bersama disertai dengan realisasi penggunaan anggarannya.

### Daftar Pustaka

Bappenas. (2023). Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Disampaikan dalam Seminar Nasional "Menuju Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045" tanggal 8 November 2023.

Kataoka, M. (2020). *Total factor productivity change in Indonesia's provincial economies for 1990–2015: Malmquist productivity index approach*. *Letters in Spatial and Resource Sciences*, 13(3), 233-243.

Maradana, R. P., Pradhan, R. P., Dash, S., Gaurav, K., Jayakumar, M. dan Chatterjee, D. (2017). *Does innovation promote economic growth? Evidence from European countries*. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 6(1).

Scimago. (2023). Scimago Journal & Country Rank. Diakses pada 20 November 2023 dari <http://www.scimagojr.com>

World Intellectual Property Organization. (2023). *Global Innovation Index 2023*. Geneva: WIPO.

World Intellectual Property Organization. (2022). *Global Innovation Index 2022*. Geneva: WIPO.

World Intellectual Property Organization. (2021). *Global Innovation Index 2021*. Geneva: WIPO.

World Intellectual Property Organization. (2020). *Global Innovation Index 2020*. Geneva: WIPO.

World Intellectual Property Organization. (2019). *Global Innovation Index 2019*. Geneva: WIPO.

World Intellectual Property Organization. (2018). *Global Innovation Index 2018*. Geneva: WIPO.

# Peluang Pengembangan Pariwisata Kesehatan di Indonesia

Muhammad Anggara Tenriatta Siregar<sup>\*)</sup>

## Abstrak

*Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata kesehatan. Pengembangan potensi tersebut dapat melalui hasil produksi olahan tanaman herbal, industri spa, event olahraga internasional dan pembangunan KEK Sanur. Terdapat tantangan yang dihadapi pemerintah, yakni belum adanya peta jalan pembangunan pariwisata kesehatan, belum masifnya promosi dan ketersediaan informasi mengenai pariwisata kesehatan, dan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. Dorongan kepada pemerintah diperlukan dari Komisi X DPR RI untuk segera menyusun peta jalan pembangunan pariwisata kesehatan serta memasifkan promosi dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai pariwisata kesehatan yang sudah ada dan yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Guna menekan biaya pengadaan, Komisi XI DPR RI mendorong pemerintah untuk mengatur pajak alat kesehatan (alkes) dari kategori barang mewah.*

Pemerintah bersama asosiasi dan industri wisata kesehatan menetapkan pariwisata kesehatan terdiri dari empat pilar subsektor, yaitu wisata medis, wisata kebugaran, wisata olahraga kesehatan berbasis *event* olahraga dan wisata ilmiah kesehatan berbasis MICE (*Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions*). Indonesia memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kesehatan mengingat Indonesia mempunyai kekayaan alam, destinasi wisata dan kebudayaan yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Inisiatif pariwisata kesehatan perlu dilakukan karena banyaknya WNI yang memilih untuk melakukan pengobatan di luar negeri. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa terdapat sekitar 2 juta WNI berobat ke luar negeri setiap tahun dan Indonesia kehilangan devisa sekitar Rp170 triliun per tahun yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut (Santoso, 2023).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI tanggal 14 November 2023, menyampaikan nilai devisa dari sektor pariwisata Indonesia tahun 2022 mencapai US\$6,72 miliar dengan kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 3,6 persen. Di tahun 2023, pemerintah menargetkan nilai devisa

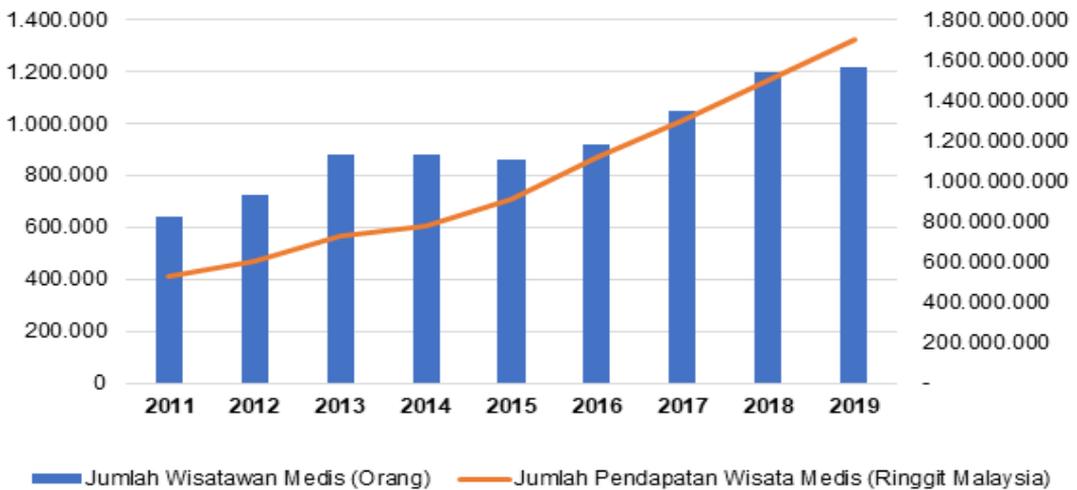
pariwisata mencapai rentang US\$7,08-9,99 miliar dengan target kontribusi terhadap PDB sebesar 4,1 persen. Realisasinya, nilai devisa sektor pariwisata telah mencapai US\$6,08 miliar dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 3,76 persen pada triwulan II tahun 2023. Untuk tahun 2024, pemerintah menargetkan nilai devisa pariwisata berada di rentang US\$7,38-13,08 miliar atau naik hingga 30,93 persen dari target tahun 2023 dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 4,5 persen. Pariwisata kesehatan dapat menjadi sub sektor unggulan pariwisata Indonesia ke depannya guna mendukung capaian target 2024.

## Wisata Kesehatan Thailand dan Malaysia

Besarnya peluang pengembangan pariwisata kesehatan dapat dilihat dari dampaknya pada beberapa negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. Wisata kesehatan di Malaysia menjadi salah satu faktor penting pemicu pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah Malaysia bahkan membentuk lembaga di bawah Kementerian Kesehatan yang berfokus menjadikan pariwisata kesehatan, khususnya medis Malaysia sebagai destinasi global. Dampaknya dapat dilihat pada jumlah

<sup>\*)</sup> *Analisis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.*

Gambar 1. Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Wisata Medis Malaysia Tahun 2011-2019



Sumber: Sarana & Sari (2022), diolah.

wisatawan medis yang selalu mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2019 (Sarana & Sari, 2022). Wisata kesehatan telah mempercepat pertumbuhan ekonomi jangka pendek sebesar 25,5 persen dan jangka panjang sebesar 38 persen di Malaysia (Anggiri & Ilyas, 2019).

Perkembangan wisata kesehatan di Thailand dimulai sejak tahun 1997 dan di tahun 2003, pemerintah Thailand menerapkan *medical hub policy* yang tercantum dalam rencana strategis untuk pariwisata kesehatan Thailand, yaitu Thailand: *The Excellent Medical Hub of Asia 2003-2008*. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan Thailand sebagai pusat pariwisata kesehatan di Asia. Setelah itu, pada tahun 2012 pemerintah Thailand mengesahkan Rencana Pembangunan Nasional ke-11 tahun 2012 yang berisi peningkatan daya saing global penyedia layanan kesehatan dan menciptakan strategi medis pada tahun 2014-2018 yang berjudul *Thailand As A World Class Healthcare Provider*. Dampaknya, terjadi peningkatan kedatangan pasien asing untuk berobat di Thailand di tahun 2016 sebanyak 3,3 juta menjadi 4 juta orang pada tahun 2018 (Wedana *et al.*, 2022). Secara ekonomi, wisata kesehatan Thailand membantu meningkatkan pendapatan di sektor bisnis dan pariwisata terkait dengan menghasilkan nilai tambah pada PDB sebesar 0,4 persen (Anggiri

& Ilyas, 2019). Hal ini menggambarkan bahwa pariwisata kesehatan memiliki dampak yang cukup besar di kedua negara dengan perencanaan dan pengelolaan yang benar.

### Potensi Pariwisata Kesehatan Indonesia

Salah satu yang berpotensi menjadi unggulan Indonesia adalah berbagai macam tanaman herbal yang dapat dijadikan minuman jamu atau obat herbal tradisional. Jamu juga merupakan komoditas yang cukup diminati oleh negara lain. Hal ini terlihat dari ekspor jamu Indonesia yang mencapai US\$ 41,5 juta pada tahun 2021, meningkat 10,96 persen dari tahun 2019 (Kementerian Luar Negeri, 2021).

Indonesia juga memiliki industri spa yang menjanjikan. Merujuk laporan dari Global Wellness Institute (2023), pendapatan dari industri spa mencapai angka US\$1 juta dengan jumlah spa sebanyak 2.934 tempat yang terdiri dari spa hotel/resor, salon, dan lainnya. Indonesia bahkan merupakan industri spa keenam terbaik di Asia Pasifik pada tahun 2017 (Yeung & Johnston, 2018). Berdasarkan hal tersebut, industri spa Indonesia memiliki potensi untuk menarik perhatian wisatawan dan menjadi salah satu sub sektor pariwisata kesehatan unggulan Indonesia.

Destinasi prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah bisa dipadukan dengan *event-event* olahraga internasional sebagai wisata olahraga kesehatan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi tersebut. Beberapa *event* olahraga internasional bahkan sudah dilaksanakan di beberapa destinasi prioritas maupun kota-kota di Indonesia dengan harapan dapat menimbulkan manfaat secara ekonomi di wilayah tersebut. Menparekraf di dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa di tahun 2023, terdapat 8 *event* olahraga internasional yang diselenggarakan di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di antaranya diselenggarakan di beberapa destinasi prioritas seperti Mandalika dan Danau Toba.

Langkah awal pemerintah dalam mengembangkan pariwisata kesehatan adalah dengan memfokuskan pengembangan wisata kesehatan di Bali sebagai salah satu destinasi yang lengkap secara potensi untuk bisa dikembangkan sesuai dengan pilar-pilar pariwisata kesehatan (Sutrisno, 2022). Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur. KEK Sanur ini akan menjadi KEK kesehatan pertama di Indonesia. Pengembangan KEK Sanur bertujuan untuk mengintegrasikan layanan kesehatan dan pariwisata dengan berbagai fasilitas berstandar internasional yang melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Pembangunan KEK ini dianggarkan sebesar Rp1,77 triliun yang dikelola oleh PT Hotel Indonesia Natour (HIN) selaku anak perusahaan dari PT Aviassi Pariwisata Indonesia, di mana pembangunan ini mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai sebesar Rp142 miliar. Secara ekonomi, keberadaan KEK Sanur diharapkan dapat menarik 4-8 persen WNI yang sebelumnya berobat di luar negeri, penghematan devisa hingga Rp86 triliun diikuti tambahan devisa mencapai Rp19,6 triliun hingga tahun 2045 (Putra, 2022). Keberadaan KEK

Sanur juga diharapkan dapat menarik investasi sebesar Rp6,2 triliun pada tahun 2030 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 18.375 orang. Dengan potensi-potensi yang ada, pariwisata kesehatan mempunyai peluang yang cukup besar jika dikembangkan dengan perencanaan yang baik di Indonesia.

### **Tantangan Pengembangan Pariwisata Kesehatan di Indonesia**

Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan pariwisata kesehatan di Indonesia yang harus diatasi oleh pemerintah. **Pertama**, belum adanya peta jalan pengembangan pariwisata kesehatan. Dalam Keputusan Bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Menteri Kesehatan Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Kesehatan Indonesia yang dikeluarkan pada awal tahun 2022 disebutkan bahwa perlu adanya Rencana Aksi Nasional (RAN) yang memuat program prioritas, penanggung jawab dan linimasa dalam penyelenggaraan pariwisata kesehatan. Akan tetapi, hingga saat ini masih belum ada kejelasan dalam penyusunan RAN tersebut. DPR RI, khususnya Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan perencanaan RAN agar pengembangan pariwisata kesehatan sesuai dengan tujuannya.

**Kedua**, Masih rendahnya kualitas pelayanan berdasarkan hasil survei merupakan hal utama yang harus menjadi perhatian untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, biaya yang dikenakan oleh rumah sakit juga sudah cukup tinggi. Kualitas pelayanan dapat dilihat dari penyediaan dan fasilitas pelayanan, seperti teknologi alkes. Masih kurangnya teknologi alkes yang canggih dikarenakan mahalnya biaya pajak pengadaan alkes karena masih dikategorikan sebagai barang mewah (Hakim, 2023). Hal ini berdampak pada dua hal, biaya layanan yang dikenakan oleh rumah sakit akan menjadi lebih mahal atau rumah sakit belum akan meningkatkan kualitas alkes selama tidak dalam kondisi mendesak. Komisi XI DPR

RI perlu mendorong pemerintah agar dapat mengeluarkan pajak alkes dari kategori barang mewah sehingga pajak yang dikenakan dapat ditekan. Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong pengembangan produksi alkes dalam negeri.

**Ketiga**, Ketersediaan informasi dan promosi mengenai pariwisata kesehatan masih sangat minim. Hal ini seperti yang dikeluhkan oleh DPR RI pada pembangunan KEK Sanur. Di mana pembangunan KEK Sanur hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tidak diimbangi dengan promosi dan pemberian informasi mengenai layanan pariwisata dan kesehatan yang akan didapatkan oleh masyarakat (DPR RI, 2023). Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk gencar mempromosikan dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai pariwisata kesehatan yang sudah ada dan yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini perlu dilakukan secara intensif untuk memberikan informasi serta mendapatkan kepercayaan dan menarik minat masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- Anggiri, V. W. & Ilyas, Y. (2019). *Impact of Medical Tourism: A Systematic Review. The 6th International Conference on Public Health*: 524 – 530.
- DPR RI. (2023). Evita Nursanty Sayangkan Promosi KEK Kesehatan Sanur Bali Belum Terkelola Optimal. Diakses melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46997/t/Evita%20Nursanty%20Sayangkan%20Promosi%20KEK%20Kesehatan%20Sanur%20Bali%20Belum%20Terkelola%20Optimal>, pada 1 Desember 2023.
- Global Wellness Institute. (2023). *The Global Wellness Economy: Indonesia, February 2023*. United States: GWI.
- Hakim, Lukman. (2023). Tekan Biaya Kesehatan, Legislator Fathan Subchi Dorong Pajak Pengadaan Alkes Dikecualikan. Diakses pada 26 November 2023 melalui [https://banten.antaranews.com/berita/246162/tekan-](https://banten.antaranews.com/berita/246162/tekan-biaya-kesehatan-legislator-fathan-subchi-dorong-pajak-pengadaan-alkes-dikecualikan)
- biaya-kesehatan-legislator-fathan-subchi-dorong-pajak-pengadaan-alkes-dikecualikan.
- Indonesia. (2022). Keputusan Bersama Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Dan Menteri Kesehatan Republik Nomor SK/13/HK.01.02/MK/2022 & Nomor HK.01.08/MENKES/637 /2022 Indonesia Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kemenparekraf.
- Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sanur. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Luar Negeri. (2021). Ekspor Jamu Indonesia Meningkatkan di Masa Pandemi. Diakses melalui <https://kemlu.go.id/penang/id/news/16139/ekspor-jamu-indonesia-meningkat-di-masa-pandemi>, pada 23 November 2023.
- Putra, I.G.K. (2022). *Sanur Special Economic Zone as Milestone of Future Quality Tourism in Bali. Bali Tourism Journal* 6(3): 62-61.
- Santoso, Djoko. (2023). Mengapa Senang Berobat ke Luar Negeri? Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/16/mengapa-senang-berobat-ke-luar-negeri>, pada 17 November 2023.
- Sarana, S. A. & Sari, V. P. (2022). Strategi *Nation Branding* Malaysia dalam Penggalakan Pariwisata Medis terhadap Publik Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Relations* 2022, Vol. 4(2): 179-200.
- Sutrisno, Eri. (2022). Menyiapkan Bali Jadi Tujuan Wisata Kesehatan. Diakses melalui <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6720/menyiapkan-bali-jadi-tujuan-wisata-kesehatan?lang=1>, pada 20 November 2023.
- TVR Parlemen. (2023). Komisi X DPR RI Raker Dengan Menparekraf/Kepala BaparekrafRI Evaluasi Program Kerja 2023

[Video]. YouTube. Diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=1lZZodj4yos>, pada 23 November 2023.

Wedana, G.N.S., Priadarsini, N.W.R., Parameswari, A.A.A.I. (2022). Strategi *Medical Tourism* Thailand Dalam Mewujudkan *Branding* Negaranya Sebagai “*Thailand As A World Class Health Care Provider*” Pada Tahun 2014-2018 Di Dunia Internasional.

Yeung, O. & Johnston, K. (2018). *Global Wellness Industry and Its Implications for Asia's Development. Global Wellness Industry: ADB White Paper.*



**Pusat Analisis Anggaran dan  
Akuntabilitas Keuangan Negara  
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI**

[www.pa3kn.dpr.go.id](http://www.pa3kn.dpr.go.id)

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @pa3kn.bkdprri

Youtube: PA3KN BK DPR RI

